

DINAMIKA SOSIAL SEBUAH DESA DI PINGGIRAN KOTA (STUDI KASUS MAGUWO HARJO, DIY)

Gutomo Bayu Aji¹

Abstract

Based on a research conducted in Maguwoharjo village, this article discusses the impact of regional reclassification from rural to rural-urban area. Without a good plan, urban expansion could create a problem of unplanned regional development, as well as environmental degradation. On the non-physical side, changes in rural to rural-urban has led to the emergence in main industry shifts from agricultural to services sectors. It also creates potential conflict as a result of in-migration to the region. Such problems would not be in existence if the development of urban region was well-planned designed with the use of collaborative management that includes the government, private sectors and the society.

Keywords: Urban expansion, urban fringe, social change

Pendahuluan

Diskusi mengenai pengelolaan suatu kawasan khususnya menyangkut pencarian format suatu bentuk pengelolaan kawasan yang ideal, terutama dalam konteks tata hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, belakangan menjadi persoalan yang menonjol, apalagi jika dikaitkan dengan proses demokratisasi dalam otonomi daerah. Diskusi ini sering dilakukan oleh kalangan *civil society* yang memiliki kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan (Kay, 1999; Juhendi, 2000), namun belakangan diskusi ini juga merebak di kalangan pemerhati masalah perkotaan khususnya menyangkut soal perubahan spasial dan sosio-kultural di daerah pinggiran kota. Artikel singkat ini mengisi satu bagian dari persoalan itu, yakni tidak adanya suatu bentuk pengelolaan kawasan desa-kota yang bisa digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan daerah pinggiran kota (*urban-fringe*) yang

¹Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2K-LIPI). Dapat dihubungi melalui e-mail ke: gutomoaji@yahoo.com.

menjadi *frontier* bagi konsekuensi meluasnya pengembangan daerah perkotaan di berbagai tempat.

Artikel ini merupakan ringkasan dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan di sebuah desa di pinggiran kota Yogyakarta, yakni Maguwoharjo. Penelitian dilakukan di empat dusun di desa Maguwoharjo yang dipilih secara stratifikasi dengan memperhatikan dusun-dusun yang lebih berkembang (*more development urban fringe*) dan dusun-dusun yang kurang berkembang (*less development urban fringe*). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan survei terhadap rumah tangga yang dipilih dengan menggunakan teknik *stratified random sampling* dan *indepth-interview* kepada informan kunci di setiap dusun. Analisis data survei dan *indepth-interview* dilakukan secara deskriptif-analitik, sedangkan analisis spasial (keruangan) didasarkan pada data sekunder hasil analisis peta topografi Desa Maguwoharjo tahun 1977 dan tahun 1999. Untuk mengkonfirmasi hasil penelitian lapangan itu telah dilakukan observasi lapangan kembali pada sekitar bulan September 2009.

Maguwoharjo: Gambaran Suatu Desa yang Semakin Memudar

Gambaran tentang suatu komunitas desa yang semakin memudar, yakni desa Maguwoharjo, sangat terkait dengan perkembangan desa itu menjadi semakin urban atau lebih urban. Berdasarkan cerita penduduk setempat, sebelum dilalui ring-road (jalan lingkar kota Yogyakarta), Maguwoharjo merupakan desa yang terisolir. Desa ini tidak dilalui sistem transportasi dan informasi serta komunikasi, sehingga penduduk walaupun berada di pinggiran kota masih terkesan amat bersahaja. Sistem budaya yang dilangsungkan melalui tradisi-tradisi kehidupan masyarakatnya masih berlangsung dengan baik. Walaupun terdapat suatu gambaran bahwa desa ini sebelumnya merupakan desa pertanian yang kurang maju, namun bukan berarti penjagaan atas tradisi di desa ini kurang diperhatikan. Asumsi yang menyatakan bahwa tradisi masyarakat desa itu lebih kuat atau semakin kuat di daerah pertanian yang subur (karena hubungan kepercayaan dengan tingkat keberhasilan hidup), barangkali mendapatkan temuan lain di desa ini. Aspek ini dipertegas dengan kentalnya budaya Islam di daerah ini yang melatarbelakangi berbagai kegiatan tradisi di dalam kehidupannya. Dengan demikian dapat diperkirakan, apabila desa Maguwoharjo memiliki ikatan tradisi yang kuat yang bernafaskan Islam, maka tidak menutup kemungkinan desa

ini dahulu merupakan desa yang “tertutup” dari pengaruh luar. Kekuatan Islam seperti ini dikarakteristikan dengan aliran Nahdatul Ulama yang berusaha menjaga dan mempraktekkan amalan kehidupannya secara harmonis diantara agama dan budaya secara tradisional.

Pada pertengahan tahun 1980-an desa ini harus menerima kenyataan dihadapkan pada suatu perkembangan kota yang semakin mendesak. Pembangunan jalan lingkar atau *ring-road* pada sekitar tahun 1985 seolah telah mendobrak kungkungan masyarakat lama (tradisional) itu ke dalam suatu percaturan perkotaan yang lebih luas. Diberikannya fasilitas atau infrastruktur jalan raya seperti ring-road, sistem transportasi yang memadai, penerangan, informasi dan telekomunikasi telah merombak desa tersebut menjadi desa di daerah pinggiran kota yang semakin terbuka. Mobilitas penduduk, baik penduduk masuk maupun keluar desa, menjadi semakin meningkat karena dimudahkan oleh berbagai fasilitas tersebut. Proses pembauran penduduk dengan pendatang, dan penduduk dengan interaksi kota menjadi tak terelakkan dan membentuk suatu pola kebiasaan dalam kehidupan mereka. Fenomena semacam ini sedikit banyak mendorong munculnya konsep wilayah *urban fringe*, yang bukan hanya dipahami sebagai suatu kesatuan spasial melainkan juga sosio-kultural.

Tingkat-tingkat perkembangan urban mulai berlangsung di sebagian besar desa tersebut, dan semakin merata seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk, terutama urbanisasi yang masuk serta pembangunan fisik yang semakin ekspansif. Penduduk dusun yang berada di dekat ring-road telah menjadi ujung tombak pertahanan utama dari serangan *frontier* yang berasal dari kota. Berkembangnya dunia pendidikan seperti dibangunnya kampus-kampus di sepanjang ring-road dengan seperangkat pendidikannya seperti kalangan akademisi merupakan salah satu *frontier* yang penting bagi perkembangan desa ini ke arah yang lebih urban. Di samping kaum pendatang dengan segala aktivitas perekonomiannya, baik yang dilakukannya di dalam desa itu maupun di luar desa, juga menjadi bagian dari *frontier* utama yang penting bagi berkembangnya urban di desa ini.

Fringe Area: Dari Spasial Desa Ke Desa-Kota

Analisis spasial terhadap peta topografi Desa Maguwoharjo selama kurun waktu 20 tahun memperlihatkan adanya perubahan

fungsi-fungsi spasial yang sangat menyolok. Analisis ini didasarkan pada rekonstruksi peta berdasarkan peta topografi tahun 1977 ke tahun 1999. Analisis ini menghasilkan suatu ilustrasi visual-spasial yakni bagaimana fungsi-fungsi spasial di desa Maguwoharjo itu telah berubah secara drastis pada tahun 1999. Untuk menjelaskan ilustrasi visual-spasial ini diperlukan dukungan data statistik penggunaan lahan desa yang bersumber dari analisis peta topografi tahun 1977 tersebut. Berdasarkan analisis ini, perubahan fungsi spasial di desa Maguwoharjo bisa dijelaskan dengan cara mengikuti dua periodisasi waktu yakni antara kurun waktu tahun 1977-1993 dan 1993-1999.

a. Periode Tahun 1977-1993: Pembangunan Fasilitas Umum

Pada tahun 1977, fungsi lahan terbesar di desa Maguwoharjo digunakan untuk sawah (42,9%). Hal ini mengindikasikan bahwa corak masyarakat desa Maguwoharjo adalah masyarakat pertanian yakni pertanian sawah. Ilustrasi ini juga terlihat pada peta topografi tahun 1977 dimana permukiman penduduk (31,9%) terkesan dikelilingi oleh areal persawahan yang relatif masih cukup luas. Sementara itu, areal permukiman penduduk tampak berkembang secara alami mengikuti koridor sepanjang jalan (utama). Di belakang permukiman umumnya sudah dimanfaatkan penduduk untuk areal persawahan.

Menarik sekali mengikuti perkembangan pola permukiman penduduk yang berkembang secara alami yang membentuk suatu areal permukiman penduduk pedesaan dan yang mempunyai interaksi langsung dengan lingkungannya, yakni sawah. Pola ini juga didukung misalnya dengan tersedianya lahan untuk tubuh air (6%) dan ladang/tegalan (19,2%) yang menunjukkan adanya sistem pertanian lahan kering, walaupun persentasenya kecil. Artinya, tidak seluruh lahan pertanian di desa itu sejak dahulu terkena aliran irigasi teknis yang disediakan oleh selokan (*chanal*) Mataram, yang sudah dibangun sejak jaman pemerintahan Jepang (1942-1945).

Pada tahun 1993, areal permukiman penduduk telah meningkat (29,3%) atau kini persentase luasnya menjadi 41,2%, lebih luas dari areal persawahan (35,2%). Sedangkan luas areal persawahan terhitung telah menurun sekitar -18,0%. Data yang sangat mengejutkan ditunjukkan oleh penurunan luas areal ladang/tegalan yang luar biasa yakni mencapai -56,6%, sedangkan tubuh air menurun -7,4%. Di samping itu, pada tahun 1993 ini variasi fungsi lahan menunjukkan

adanya kebun campur (3,4%), perumahan (0,7%), lahan tidur (3,7%), lahan komersial (0,9%), dan fasilitas umum lainnya (1,1%). Variasi fungsi lahan pada tahun ini lebih banyak jika dibandingkan pada analisis tahun sebelumnya (1977), dan terkesan mulai mengaburkan fungsi-fungsi dominan saat itu seperti pertanian dan permukiman.

Perubahan yang cukup besar pada tata fungsi lahan di desa Maguwoharjo ini setidaknya dipicu oleh tiga hal, yakni: (1) dibangunnya jalan lingkar (*ring-road*) kota Yogyakarta yang melintasi desa Maguwoharjo sejak tahun 1985, (2) dibangunnya sejumlah kampus swasta seperti Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Pembangunan Nasional (UPN), Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER), Universitas Sanata Dharma (SADAR), dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE-YKPN) yang berada di sekitar desa itu, dan (3) dibangunnya kompleks perumahan di desa dan terutama sebagian besar berada di sekitar desa ini.

Sejumlah fasilitas umum yang dibangun di desa dan di sekitar desa Maguwoharjo itu telah menjadi daya tarik pendatang untuk menempati lahan desa itu. Kampus misalnya, telah menyedot sejumlah besar mahasiswa yang tinggal di desa dan di sekitar desa itu dengan cara menyewa pondokan. Di sepanjang koridor *ring-road* sejumlah besar pendatang karena tertarik dengan mudahnya akses transportasi mulai membangun permukiman-permukiman baru yang cenderung membentuk suatu pola yang memusat (*aglomerasi*) dan menghimpun (*konurbasi*) (Subroto, 2000). Demikian pula dengan keberadaan kompleks perumahan baru.

b. Periode Tahun 1993-1999: Pengembangan Fasilitas Jasa

Jika pada periode sebelumnya yakni periode tahun 1977-1993 perubahan spasial di desa Maguwoharjo ditandai dengan dibangunnya fasilitas umum seperti jalan dan kampus, maka pada periode berikutnya yakni pada periode tahun 1993-1999 perubahan spasial di desa Maguwoharjo ditandai dengan dibangunnya fasilitas-fasilitas komersial. Kecenderungan pola pada kedua periode waktu itu juga berbeda, disamping karena sifatnya, juga karena faktor pembentuknya. Jika pada periode pertama pembangunan fasilitas-fasilitas umum dilakukan oleh pemerintah dan swasta, maka pada periode kedua ini didominasi oleh kegiatan individu dan rumah-tangga.

Perubahan penggunaan lahan yang sangat menyolok pada periode ini adalah meningkatnya persentase perubahan lahan komersial yakni mencapai sekitar 469,8%. Gejala ini tetap diikuti dengan merosotnya lahan pertanian sawah (-11,6%), kebun campur (-27,9%), dan lahan kosong (-21,9%). Gejala lain yang menarik adalah meningkatnya penggunaan lahan perumahan (95,1%). Meningkatnya jumlah lahan yang diperuntukkan guna lahan perumahan juga mengindikasikan adanya proses komersialisasi lahan-lahan pedesaan yang semakin tinggi.

Gejala pembentukan kawasan desa-kota, sebenarnya sudah dimulai dengan sangat nyata pada periode pertama yakni tahun 1977-1993, ditandai oleh berbagai pembangunan fasilitas publik. Sementara itu pada periode tahun berikutnya yakni 1993-1999, proses pembentukan kawasan desa-kota itu ditandai dengan komersialisasi lahan-lahan desa. Gejala komersialisasi ini juga diikuti dengan proses privatisasi lahan-lahan desa menjadi lahan-lahan yang semakin ketat kepemilikannya serta semakin efektif peruntukannya.

Sementara itu gejala komersialisasi lahan yang paling populer di desa ini adalah merebaknya fungsi-fungsi komersial individu serta rumah-tangga terhadap lahan-lahan milik pribadi mereka. Penggunaan lahan untuk sarana perdagangan umum dalam skala kecil tetapi dalam jumlah yang menjamur merupakan ciri pemanfaatan lahan untuk kegiatan jasa (perekonomian) dalam skala kecil (individu dan rumah-tangga). Gejala ini merupakan respon meningkatnya kebutuhan penduduk asli dan pendatang terhadap fasilitas jasa sehari-hari.

Pada kedua periode waktu itu sangat jelas terlihat bagaimana desa Maguwoharjo telah berkembang menjadi suatu kawasan desa-kota dengan fasilitas umum dan komersial kota. Keberadaan Maguwoharjo yang dekat dengan bandar udara Adisutjipto mendorong investor untuk membangun hotel-hotel di desa dan sekitar desa ini, seperti, Sheraton Mustika Ratu. Sebagai suatu kompleks kawasan desa-kota, Maguwoharjo secara keseluruhan bersama dengan wilayah kecamatan Depok, kabupaten Sleman, diorientasikan untuk pengembangan kawasan wisata dan pendidikan (Riyadi, 2001).

Kegiatan Jasa: Fenomena Struktur Sosial Kekotaan

Data pada bagian ini didasarkan pada hasil survei terhadap kondisi sosial-ekonomi rumah tangga penduduk desa Maguwoharjo

pada tahun 2000 dan pengamatan lapangan sampai tahun-tahun terakhir sekarang ini. Survei ini mengambil sampel kecil yakni 160 responden di empat dusun di desa itu yang dipilih secara *stratified*. Dasar pemilihan dusun itu adalah dusun-dusun yang lebih terbangun (*More Development Urban Fringe*) dan dusun-dusun yang kurang terbangun (*Less Development Urban Fringe*) yang ada di bagian dalam (*inner-fringe*) dan di bagian luar (*outer-fringe*) *ring-road* (Subroto, 2000).²

Beberapa hasil survei yang penting ditampilkan pada bagian ini adalah jenis pekerjaan penduduk dan penghasilan. Sementara itu untuk menganalisis hubungan-hubungan di dalam struktur sosial itu digunakan analisis data kualitatif mengenai jenis kegiatan di sektor ini dan kaitannya dengan kehidupan mereka termasuk di antaranya kecukupan penghasilan mereka. Data ini dikumpulkan melalui *indepth-interview* dengan beberapa informan kunci.

Berdasarkan hasil survei terlihat bahwa sebagian besar pekerjaan penduduk berada di sektor jasa (76,2%) yang dikelompokkan menjadi kegiatan jasa pelayanan masyarakat (20,6%) dan kegiatan jasa dengan komponen perekonomian yang mencapai persentase tertinggi (55,6%). Sementara itu jenis pekerjaan di sektor pertanian sudah sangat rendah (11,9%) terutama bergantung pada hasil sawah (10,6%) dan pemeliharaan hewan (1,3%).

Variasi jenis pekerjaan yang lain tersebar di antara sektor perdagangan (5,6%), industri (1,3%), dan purnabhakti (5,0%). Dengan melihat variasi jenis pekerjaan ini dapat dikatakan bahwa Maguwoharjo bukan lagi desa yang murni dalam arti yang mengandalkan pada sektor pertanian semata. Ada jenis-jenis pekerjaan lain yang tumbuh bahkan cukup dominan menggeser jenis pekerjaan di sektor pertanian, yakni jenis pekerjaan di sektor jasa.

Jenis-jenis pekerjaan di sektor jasa ini sangat variatif, misalnya: sopir, makelar, agen/distributor, bengkel, buruh cuci, pemulung sampah, warung makan, toko kelontong, tambal ban dan wartel. Umumnya jenis-jenis pekerjaan di sektor jasa yang berkembang di daerah ini merupakan jenis pekerjaan jasa skala kecil. Jenis pekerjaan ini biasanya dilakukan

²Batasan *inner-fringe* dan *outer-fringe* disini menggunakan batasan fisik yakni *ring-road* yang melingkari kota Yogyakarta. Batasan dengan menggunakan jarak dikemukakan oleh Russwurm (1987), lihat juga Koestoer, (1997).

oleh perseorangan untuk mencukupi kebutuhan subsistensi rumah-tangga.

Apabila memperhatikan tingkat penghasilan penduduk terlihat bahwa sebagian besar di antara mereka berpenghasilan di bawah Rp500.000,- per bulan dan sebagian besar di bawah Rp250.000,- per bulan. Penduduk yang berpenghasilan di atas satu juta rupiah per bulan sangat sedikit dan mereka yang memiliki penghasilan ini adalah pendatang yang mempunyai pekerjaan sangat mapan antara lain adalah dosen perguruan tinggi di Yogyakarta. Mereka ini yang kemudian dianggap penduduk setempat sebagai orang kaya.

Apabila memperhatikan tempat kerja penduduk terlihat bahwa sebagian besar mempunyai tempat kerja di dalam desa sendiri, sebagian kecil lainnya berada di luar desa, luar kecamatan, luar kabupaten dan propinsi. Berdasarkan hasil wawancara, penduduk yang bekerja di luar propinsi mempunyai pekerjaan tetap di Yogyakarta tetapi sebagian waktunya digunakan untuk bekerja di Jakarta. Di antara mereka ini hanya segelintir orang yang disebut sebagai orang kaya.

Memudarnya Kegiatan Pertanian dan Struktur Agraris

Hasil tabulasi silang antara penguasaan luas sawah dengan jenis pekerjaan penduduk memperlihatkan bahwa sebagian besar (68,6%) sawah dikuasai oleh orang-orang yang jenis pekerjaannya bukan petani. Mereka umumnya menguasai sawah tetapi tidak menggarapnya atau sebatas sebagai pemilik, bukan penggarap. Sementara itu yang menjadi penggarap adalah petani penyewa, biasanya dengan sistem bagi hasil, atau dari hubungan sewa-menyewa ini kemudian muncul jenis pekerjaan buruh tani.

Dari hasil survei juga terlihat bahwa mereka yang menguasai sebagian besar sawah itu adalah orang-orang yang mempunyai jenis pekerjaan di sektor jasa, baik jasa pelayanan masyarakat maupun jasa dengan komponen perekonomian. Di samping itu, jenis pekerjaan pensiun dan perdagangan juga mengambil peran dalam penguasaan sawah ini. Sementara petani hanya menguasai sebagai kecil (31,4%) dari luas sawah yang ada.

Data penelitian menunjukkan bahwa penguasaan sawah itu jauh lebih besar dikuasai oleh penduduk asli (97,8%) daripada penduduk pendatang. Artinya, hanya sebagian kecil penduduk pendatang yang

menguasai sawah dan bermatapencaharian sebagai petani. Umumnya penduduk pendatang sudah memiliki pekerjaan tetap sebelum tinggal di daerah ini, dan mereka tinggal di daerah ini karena mencari lokasi permukiman, bukan pekerjaan.

Dari fenomena ini terlihat bagaimana hubungan-hubungan dalam struktur agraris itu telah mengalami pergeseran yang cukup berarti, terutama dengan dikuasainya sawah oleh sekelompok orang yang bukan petani. Artinya, mata pencaharian pertanian kini telah menjadi jenis mata pencaharian bukan utama melainkan mata pencaharian tambahan. Pandangan ini terutama datang dari orang-orang yang memiliki jenis pekerjaan di sektor jasa dan menguasai sawah.

Pandangan ini setidaknya semakin memarginalkan petani kecil dan buruh tani yang menganggap jenis pekerjaan itu sebagai matapencaharian utamanya. Sifat ketergantungan petani kecil dan buruh tani pada sekelompok orang yang bermatapencaharian utama di sektor jasa ini juga tidak mendukung hubungan-hubungan agraris, karena sektor jasa yang telah menjadi tumpuan utama yang akan berkembang sementara sektor pertanian hanya tambal-sulam.

Penduduk Lokal vs (Elit) Pendatang

Berbagai pandangan yang diperoleh dari hasil wawancara menunjukkan hubungan antara penduduk lokal dengan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Keduanya mempunyai sifat-sifat yang kontroversial, seperti: penduduk lokal dianggap bodoh dan tak berpendidikan sementara penduduk pendatang dipandang berpendidikan dan wakil dari kemajuan. Penduduk lokal dipandang miskin, sementara penduduk pendatang dianggap kaya dan membawa perubahan lingkungan, dsb.

Secara sosial-ekonomi, penduduk pendatang mewakili kelompok kaya atau yang dalam hubungan kemasyarakatannya disebut elit ekonomi; sementara penduduk lokal menerima realitas itu sambil menyaksikan runtuhnya elit-elit sosial lama yang didasarkan atas penguasaan tanah dan hubungan-hubungan kerja majikan-buruh. Seiring dengan memudarnya aktivitas pertanian, elit sosial lama telah tergantikan oleh elit sosial baru yang tidak tergantung dari sistem matapencaharian pertanian, dan cenderung terpelajar.

Perbedaan basis mata pencaharian, latar belakang pendidikan, kondisi sosial-ekonomi, gaya hidup dan pandangan-pandangan kemasyarakatan lainnya telah menimbulkan gap/jurang pemisah antara penduduk lokal dengan pendatang di dalam dusun. Kondisi ini diperparah dengan tidak membaurnya penduduk pendatang yang tinggal di permukiman penduduk lokal, seperti dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang sudah berlangsung lama pada masyarakat itu.

Pengaruh pendatang yang cukup kuat terlihat dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di antaranya pada komersialisasi bentuk-bentuk kegiatan gotong-royong di dusun yang dibayar dengan uang. Sebagai ganti tradisi gotong-royong, mereka membayar pembangunan fisik di dalam dusun seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum lainnya. Dengan demikian kesenjangan antara penduduk lokal dengan pendatang itu tetap terjaga sehingga tidak menimbulkan konflik secara terbuka.

Persepsi Penduduk Terhadap Lingkungan

Survei terhadap persepsi penduduk berkenaan dengan kondisi tanah, air, dan udara memperlihatkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa kondisi lingkungan fisiknya masih cukup baik, walaupun menurunnya kualitas lingkungan fisik sudah mulai dirasakan oleh mereka. Kekhawatiran penduduk terhadap kondisi lingkungan fisik juga dirasakan tinggi, di antaranya terjadinya penggusuran, limbah rumah tangga, tidak adanya tempat pembuangan sampah, banyaknya alat, udara semakin kotor, sumur semakin dalam, irigasi macet, dsb.

Dari berbagai jenis kekhawatiran itu, menurut responden hal paling menonjol adalah tingkat kekhawatiran penduduk terhadap sungai yang semakin kotor dan tidak adanya tempat pembuangan sampah, yang keduanya mempunyai keterkaitan pada perilaku penduduk yang membuang sampah ke sungai. Di samping itu, adanya kesenjangan sosial yang semakin tinggi antara penduduk lokal dan pendatang juga menyebabkan kurang terjaminnya rasa keamanan dan hubungan sosial yang tidak akrab.

Umumnya responden (70%) juga merasakan adanya penyempitan lahan. Kendatipun hal ini tidak menimbulkan dampak kepada diri mereka, namun sebagian besar dari mereka sudah merasakan bahwa lingkungan di sekitarnya itu bertambah ramai/banyak. Sebagian besar responden lainnya juga merasakan lingkungan di

sekitarnya sudah semakin sumpek (sesak). Kondisi sebaliknya dirasakan oleh sebagian kecil responden yang memiliki jenis usaha yang meningkat, walaupun hal itu diyakini mengurangi hasil-hasil sawah serta merugikan kalangan petani.

Komersialisasi tanah juga ditanggapi oleh penduduk asli yang mana sebagian besar dari mereka pernah menjual tanahnya dan menyewakan tanahnya. Proses alih fungsi lahan juga berlangsung di daerah ini, disamping tradisi pewarisan tanah yang masih terus berlangsung di dalam keluarga. Komersialisasi tanah ini juga mendorong berubahnya nilai terhadap tanah, sebagaimana dikatakan salah seorang informan berikut:

”Kalau orang yang berpikiran maju maka ia akan menjual tanahnya dengan harga yang lumayan tinggi, kemudian akan membelikannya lagi tanah di tempat lain yang lebih murah harganya. Sehingga ia akan memperoleh tanah yang lebih luas di luar dusun. Perbandingannya kalau bisa 200 : 600, artinya dengan menjual tanah seluas 200 m² maka akan diperoleh 600 m². Namun bagi orang-orang yang belum maju pikirannya, ia akan membiarkan tanah miliknya tetap menjadi tegalan atau kebun”

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir misalnya, harga tanah di daerah ini sudah melonjak 30 sampai 40 kali lipat. Pada tahun 1982, harga tanah di sepanjang koridor jalan utama desa itu Rp7.000,- per m², tetapi sekarang harga tanah di lokasi yang sama sudah mencapai antara Rp200.000,- sampai dengan Rp300.000,- per m². Kondisi ini merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap kualitas dan kuantitas lahan-lahan pertanian.

Terbentuknya Komunitas-komunitas Baru

Salah satu fenomena yang paling menarik di kawasan desa-kota di daerah pinggiran kota ini adalah munculnya komunitas-komunitas baru berdasarkan kelas sosial, etnisitas dan peranan gender. Berbeda dengan komunitas sebelumnya yang cenderung homogen yakni komunitas masyarakat petani dengan sistem sosial kekerabatan yang kental dan bercorak khas pertanian (Tonnie, 1958). Masyarakat baru di kawasan desa-kota ini terbentuk atas suatu komunitas-komunitas yang lain sama sekali dari masyarakat petani itu.

Apabila struktur sosial lama dicirikan dengan hubungan-hubungan sosial feodalistik yang diperankan oleh kalangan petani dan didominasi oleh corak hubungan pertanian, kini dominasi hubungan seperti itu kian runtuh dan digantikan oleh hubungan sosial yang lebih kompleks. Runtuhnya dominasi dalam hubungan pertanian menjadi fenomena menarik di daerah pinggiran kota ini karena diikuti dengan munculnya struktur jasa yang cukup dominan. Struktur ini menggantikan peranan sektor pertanian, walaupun tidak bisa menjadi lokomotif pertumbuhan (Kunio, 1990).

Struktur jasa telah membentuk suatu sistem sosial masyarakat yang tergantung pada usaha jasa, dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dusun berguna untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Struktur ini terkait erat dengan sistem pasar yang menyediakan barang-barang kepada masyarakat yang semakin konsumtif. Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang tergantung pada usaha jasa ini cenderung terbentuk sebagai suatu komunitas masyarakat yang konsumtif.

Keberadaan pendatang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam proses pembentukan usaha jasa ini, terutama kalangan mahasiswa yang membutuhkan barang dan jasa yang siap pakai, serta menuntut pola konsumsi yang cukup tinggi dan tidak mampu memproduksi barang dan jasa itu sendiri. Bagi penduduk lokal hal ini menyediakan lapangan pekerjaan baru tanpa harus bekerja keras, misalnya dengan cara menyewakan rumahnya untuk pondokan mahasiswa.

Terbentuknya komunitas mahasiswa di dusun-dusun di desa ini menjadi sangat eksklusif karena disamping mereka sangat tergantung dan mengandalkan kerja jasa penduduk lokal, mereka juga cenderung elitis dalam pergaulan. Mereka adalah kaum terpelajar yang dalam kenyataan sehari-hari sulit berbaur dengan kenyataan hidup penduduk lokal. Komunitas mereka berbasis pada kampus dan ilmu pengetahuan.

Sifat yang paling menonjol dari komunitas mahasiswa di desa ini adalah karakteristik multi-etnisnya. Dengan latar belakang etnis yang berbeda-beda itu tidak jarang menimbulkan benturan budaya dengan penduduk lokal, terutama perilaku mahasiswa yang tidak sesuai dengan kebiasaan penduduk asli. Konflik seringkali mewarnai hubungan antara mahasiswa pendatang ini dengan penduduk lokal yang biasanya didamaikan oleh aparat pemerintahan desa.

Di samping komunitas mahasiswa yang bercirikan multi-etnis, penduduk pendatang yang tinggal menetap di daerah itu juga mempunyai karakter multi-etnis. Hubungan-hubungan sosial di antara penduduk pendatang ini dengan penduduk lokal lebih sering terbentuk kerjasama dalam upaya meredam konflik. Misalnya, tidak hadirnya penduduk pendatang dalam kegiatan sosial kemasyarakatan warga digantikan dengan cara membayarnya dengan sejumlah uang. Hal ini bisa diterima penduduk lokal dan menjadi jalan kompromis penyelesaian konflik.

Kendatipun terkesan eksklusif, penduduk pendatang masih mempunyai kesediaan untuk membaur, walaupun biasanya mengalami masalah dengan rutinitas serta waktu yang dimilikinya yakni yang tidak sesuai dengan rutinitas serta pola kerja penduduk lokal yang umumnya hanya bekerja di desanya sendiri dalam bentuk kerja serabutan. Beberapa penduduk pendatang yang bisa menerima keadaan ini bahkan dianggap penduduk lokal sebagai pendorong perkembangan.

Di antara penduduk pendatang ini juga ada yang terlibat aktif di dalam kegiatan sosial keagamaan, sehingga diterima sebagai seorang pemimpin keagamaan di desa itu. Hal ini mencerminkan adanya suatu bentuk perebutan pengaruh sosial di dalam kepemimpinan keagamaan, seperti dalam kepengurusan masjid di dusun itu yang memang mempunyai kegiatan serta pengaruh yang cukup kuat.

Pengaruh pendatang dalam pembentukan komunitas-komunitas lokal ini juga sangat terasa dalam meningkatnya hubungan-hubungan gender yang semakin sederajat. Hal ini sangat terasa karena semakin banyaknya penduduk pendatang, terutama perempuan yang juga mempunyai pekerjaan di luar rumah, disamping menjadi ibu rumah tangga. Wanita sebagai pekerja dipandang positif dibandingkan dengan keadaan sebelumnya yang menganggap wanita berada pada urusan domestik.

Komunitas-komunitas baru juga muncul di dalam kompleks perumahan yang sangat eksklusif. Komunitas ini tidak berbaur dengan penduduk lokal di sekitarnya ataupun sesama pendatang yang menetap di permukiman penduduk. Komunitas ini juga tidak dikenai kewajiban-kewajiban sosial yang telah sejak lama dilakukan oleh penduduk asli di dusun itu, seperti gotong-royong ataupun denda seperti membayar uang sebagai ganti ketidakhadirannya.

Berdasarkan pengamatan terakhir, munculnya kompleks-komplek perumahan yang cenderung eksklusif itu semakin banyak sehingga gejala perubahan sosial di tingkat komunitas dusun telah meluas ke lingkup wilayah desa. Desa Maguwoharjo kini sudah terbentuk sebagai suatu kawasan desa-kota yang semakin kompleks dan tidak lagi dicirikan oleh suatu komunitas tradisional. Gejala ini juga diindikasikan dengan tidak efektifnya pemerintahan desa karena kehidupan desa yang semakin kompleks, kontrol masyarakat terhadap pemerintahan desa dan efektifitas kebijakan pemerintahan desa yang semakin lemah. Dengan bergesernya hubungan komunitas desa berdasarkan kelas sosial, etnisitas dan peranan gender itu maka fungsi desa sebagai suatu komunitas tradisional menjadi semakin kabur.

Satu-satunya wilayah administratif yang masih bertahan sebagai suatu komunitas tradisional di dalam pemerintahan desa adalah komunitas dusun. Walaupun di dalamnya kini terbangun berbagai macam komunitas baru berdasarkan kelas, etnis dan gender namun kontrol terhadap kehidupan tradisional masih tetap terjaga. Sistem pemerintahan dusun juga masih efektif dan sebaliknya kontrol masyarakat terhadap pemerintahan dusun juga masih cukup kuat.

Penutup

Berkembangnya desa menjadi suatu kawasan desa-kota secara alamiah (cenderung mengabaikan perencanaan yang ada) telah menimbulkan berbagai persoalan di kawasan itu. Berbagai persoalan yang muncul antara lain, tata ruang desa-kota yang tidak beraturan, kondisi lingkungan yang merosot, ketahanan pangan yang terancam, konflik sosial yang cenderung meluas dan dipertahankan oleh eksklusifitas kelompok di dalam komunitas itu dan ancaman tidak adanya mekanisme penyelesaian konflik yang baik.

Berbagai persoalan muncul dan cenderung tidak terkendali atas terbentuknya suatu kawasan desa-kota yang tidak terencana dengan baik. Sebagai konsekwensi dari meluasnya wilayah-wilayah perkotaan adalah berkembangnya desa-desa di daerah pinggiran kota menjadi kawasan desa-kota. Fenomena ini hampir terjadi di berbagai kota di Indonesia dan hingga saat ini tidak ada suatu sistem perencanaan yang terpadu untuk mengatasi berbagai persoalan itu.

Diskusi di dalam artikel ini mengingatkan pentingnya suatu perencanaan kawasan desa-kota dengan menggunakan pendekatan

kolaborasi yang memperhatikan kepentingan antar pihak baik kepentingan kota maupun desa. Diduga, persoalan perencanaan tata ruang perkotaan selama ini terus-menerus terjadi dan berulang karena bersifat *top down* atau mengabaikan aspek partisipasi warga desa dan warga kota. Artinya, perencanaan suatu wilayah selama ini bersifat sebagai "bahan jadi" yang harus dilaksanakan oleh para pemangku yang terkait termasuk penduduk setempat. Padahal suatu perencanaan wilayah tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada mekanisme pendukungnya.

Pengelolaan bersama di antara perencana wilayah yakni pemerintah daerah yang terkait, para pengembang, NGO's perkotaan, DPRD sebagai wakil aspirasi politik masyarakat, dan pemangku-pemangku yang terkait beserta kelompok-kelompok masyarakat semestinya dilibatkan secara bersama-sama dalam merencanakan dan menjalankan suatu pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan. Mekanisme kolaborasi semacam ini perlu dilembagakan, seperti dalam suatu forum perkotaan (*urban forum*), untuk memperkuat pemerintah daerah dalam merencanakan perluasan kota secara transparan dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Juhendi, Tadjudin, 2000. *Manajemen Kolaborasi*, Pustaka Latin.
- Kay, Robert and Jacqueline Alder, 1999. *Coastal Planning and Management*, E & FN Spon, London.
- Koestoer, Raldi Hendro, 1997. *Perspektif Lingkungan Desa-kota Teori dan Kasus*, UI press.
- Kunio, Yoshihara, 1990. *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, Jakarta, LP3ES.
- Riyadi, Rakhmat, 2001. "Dinamika Spasial Wilayah Perkotaan: Kasus Daerah Kabupaten Sleman DI Yogyakarta", dalam Koestoer, Raldi Hendro, *Dimensi Keruangan Kota Teori dan Kasus*, UI Press.
- Russwurm, Lorne H., 1987. "Comparative Land Management in the Rural-Urban Fringe of New World Cities", dalam *Rural-Urban Fringe*, C.S. Yadav, New Delhi.

Subroto, T. Yoyok Wahyu, dkk., 2000. *Model Pola Ruang Konsentris untuk Restrukturisasi daerah Pinggiran Kota (urban Fringe) di Indonesia Studi Kasus: Daerah Istimewa Yogyakarta*, Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada.

Tonnies, F, 1957. *Community and Society*, Michigan: Michigan State